

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

2022

PERWAL NOMOR 6 BD 2022/NO 6, 11 HLMN

PERWAL TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOTA TASIKMALAYA

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota dibentuk dengan maksud m upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga terciptanya penyelenggaraan good governance di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan, maka perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 94 Tahun 2021; PERMENPAN-RB No. 37 Tahun 2012; PERMENPAN-RB No. 60 Tahun 2012; Perda Kota Tsm No. 7 Tahun 2016; Perwal Kota Tsm No. 48 Tahun 2021;
 - Dalam ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut: sasaran; bentuk, jenis dan sumber benturan kepentingan; penanganan benturan kepentingan; evaluasi dan monitoring Benturan Kepentingan.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022.
 - Ketentuan mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan Benturan Kepentingan yaitu untuk tercapainya tingkat kesalahan secara minimal atau tidak dilanggarnya ketentuan yang dapat ditoleransi karena adanya Benturan Kepentingan yang dihadapi oleh Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - Lampiran 2 halaman.